

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN 2026



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN







DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan..... 7
1.3.1 Maksud 7
1.3.2 Tujuan..... 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 9
2.1 Evaluasi Rencana Kerjadan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah 9
2.1.1 Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin 20
2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin 21
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin..... 28
2.3.1 Faktor Internal 29
2.3.2 Faktor Eksternal 29
2.3.3 Faktor Ancaman / Tantangan (Threaths) 30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 40

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH 41
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 42

3.3 Program dan Kegiatan 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PERDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 56

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 56

BAB V PENUTUP 64

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Musi Banyuasin	11
TABEL 2.1.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin	19
TABEL 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021	25
TABLE 2.3	Tantangan Dan Peluang Pengembangan PD	31
TABEL 2.5	Usulan Program dan Kegitan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Musi Banyuasin	38
TABEL 3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Terhadap Kabupaten Musi Banyuasin	39
TABEL 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin	44
TABEL 3.3	Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 telah diselesai di susun yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja PD) sesuai dengan tugas popok dan fungsinya mengacu pada Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 4. Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Dokumen Perencanaan yang bersifat Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Banyuasin, dalam Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat Kebijakan Program-program dan Kegiatan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Banyuasin selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Kerja ini tersusun tidak terlepas dari pertisipasi semua pihak yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, besar harapan agar Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan serta selalu dalam Lindungan Allah SWT. Amin

Sekayu, Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

AGUS KURNIAWAN SAPUTRA, S.IP., M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19880824 200701 1 001

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebagai tahap awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional

sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangkamenengah dan tahunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana PembangunanJangkaPanjang (RPJP);Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksananya.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Mengacu pada RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 2025-2029 maka RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)Perangkat Daerah maka Program dan Kegiatan yang ada di Rencana KerjaPerangkat Daerah harus tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra)Perangkat Daerah Tahun Rencana. Program/Kegiatan Alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
3. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau;

4. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Dengan kata lain Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Smester II triwulan III, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026. Rancangan Awal Rencana Kerja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada Rencana KerjaPerangkat Daerah terkait maka Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat dapat disusun.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 yang diusulkan ke BAPPEDA selanjutnya menjadi dasar Perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dilandasi Dasar Hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025- 2045;

13. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 050/188/TAPD/SE/XII/2021 Tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
14. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-050/164/SETDA/2022 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan Tahun 2026 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat DaerahTahun Lalu.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Lampiran

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan kinerja memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Indikator masukan (input)
2. Indikator keluaran (output)
3. Indikator Hasil (outcome)

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tentang pencapaian kinerja pelayanan pada masing-masing indikator kinerja, realisasi pencapaian kinerja pada tahun berjalan bervariasi, untuk Rasio Kepemilikan KTP elektronik di Tahun 2025 di targetkan sebesar 88%, Lama pengurusan KTP realisasi 1 hari dari target 1 hari, sedangkan untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap

layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2025 ditargetkan sebesar 85%.

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan diatas 80% dan dapat dikatakan dalam kategori berhasil.

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin terdapat Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbang dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevans antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.12.1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota**						
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**						
2.12.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan
2.12.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						

2.12.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat PIM Terhadap SDM Capil	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	2 Orang
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						
2.12.01.2.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat Listrik yang diperlukan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	29 Jenis	29 Jenis	100%	29 Jenis	29 Jenis
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	51 Jenis	51 Jenis	100%	51 Jenis	51 Jenis
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	14 Jenis	14 Jenis	100%	14 Jenis	14 Jenis
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan
2.12.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Ooperasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit

2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor Secara Berkala	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**						
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Pelayanan Keliling	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Internet dan Air	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pendukung PNS dan Non PNS	86 Orang	86 Orang	100%	86 Orang	86 Orang
2.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk**						
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**						
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Admistrasi Kependudukan	Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dapat memiliki Dokumen	50 KK	50 KK	100 %	50 KK	50 KK
2.12.02.2.01.02	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	KTP elektronik dan Kartu Keluarga yang Terlayani	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100 %	15 Kecamatan	15 Kecamatan
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Kebijakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Penting	Terlayaninya Permohonan Surat Keterangan Pindah datang Warga Negara Indonesia	55000 Set	55000 Set	100 %	55000 Set	55000 Set

2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**						
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Terlayani dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Keliling	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100 %	15 Kecamatan	15 Kecamatan
2.12.03	**Program Pencatatan Sipil**						
2.12.03.2.01.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**						
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tercapainya Pelayanan Akta catatan Sipil yang mudah, cepat dan akurat	17000 Lembar	17000 Lembar	100%	17000 Lembar	17000 Lembar
2.12.04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**						
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**						
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Penyusunan Laporan Kependudukan	28 Laporan	28 Laporan	100%	28 Laporan	28 Laporan
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerjasama antar Lembaga	40 Data	40 Data	100%	40 Data	40 Data
2.12.04.2.02	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**						
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	1 Sistem	1 Sistem	100%	1 Sistem	1 Sistem

2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**						
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Administrasi Kependudukan	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat di pertanggungjawabkan	Akurasi Database Kependudukan	15000 Data	15000 Data	100%	15000 Data	15000 Data
2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan**						
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi	80%	80%	100%	80%	80%
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Penataan dan Pengembangan KUalitas SDM SIAK dalam Penguasan Teknologi Informasi	3 Orang	3 Orang	100%	3 Orang	3 Orang
2.12.05	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**						
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**						
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disusun	30 Buku	30 Buku	100%	30 Buku	30 Buku

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 di sampaikan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

  1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  6. Penyediaan Bahan/Material
  7. Fasilitas Kunjungan Tamu
  8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

  1. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pendaftaran Penduduk

- **Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

  1. Pendataan penduduk Non Permanendan rentan Administrasi Kependudukan
  2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
  3. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
  4. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

- **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**

    1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

c. Program Pencatatan Sipil

- **Pelayanan Pencatatan Sipil**

    1. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

- **Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil**

    1. Fasilitas terkait Pencatatan Sipil

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**

    1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
    2. Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan

- **Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

    1. Penyusunan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

    1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

3. Sosialisai terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan Masyarakat
5. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat di pertanggungjawabkan

- **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- **Penyusunan Profil Kependudukan**

1. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lain

2.1.1 Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2.1.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1.	Rasio Kepemilikan KTP Elektronik	%	88%	100,47%	114,17%
2.	Lama Pengurusan KTP	Hari	1 Hari	1 Hari	Baik
3.	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	%	85%	94,116%	110,78%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan perumusan Kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan Penataan dan Penerbitan Administrasi Kependudukan, dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pengembangan kebijakan kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. melaksanankan sebagian urusan rumah tangga Kabupaten dalam bidang kependudukan dan Pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin juga mempunyai fungsi antara lain :

1. Pengelolaan Urusan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas;
2. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
3. Penyusunan Visi Misi dan Rencana Strategis Dinas;
4. Perumusan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Operasional Pembangunan Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

6. Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil;
7. Pelaksanaan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan Kependudukan;
9. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Instansi terkait;
10. Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Mediasi, Edukasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Penyiapan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati;
12. Pelaksanaan Tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Mengingat data kependudukan sangat penting dalam perencanaan pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sangat penting diperlukan pengelolaan data kependudukan secara efektif dan efisien, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pelaporan yang tidak lain untuk memperoleh informasi kependudukan yang penting dan dapat digunakan untuk kepentingan publik ataupun pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tupoksi melaksanakan urusan wajib yaitu Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Urusan wajib bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdapat pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga, pelayanan penerbitan KTP baik yang berdasarkan aplikasi SIAK maupun aplikasi e-KTP, pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dan penerbitan Surat Pindah Datang bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, jenis pelayanannya adalah melayani akta kelahiran, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pasangan nikah (untuk Agama Non Muslim).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan data kependudukan yang cepat dan berkualitas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui amanat dari Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1750 Tahun 2008 tentang pelayanan KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil Gratis bagi penduduk Musi Banyuasin, Walaupun terdapat pemberlakuan gratis bagi penduduk Musi Banyuasin tentang pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih dijumpai terjadinya keterlambatan dalam pelaporan data kependudukannya oleh masyarakat. Untuk mencapai target kinerja pelayanan pada periode Renstra yang akan datang, perlu ditingkatkan lagi sosialisasi bagi masyarakat dalam pelaporan data kependudukannya.

Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dan dijabarkan dalam program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung sebanyak 95 orang yang terdiri dari :

1. Jumlah pegawai menurut pangkat /Golongan :

a.	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	0	orang
b.	Pembina Tk I (IV/b)	:	2	orang
c.	Pembina (IV/a)	:	5	orang
d.	Penata Tk. I (III/d)	:	21	orang
e.	Penata (III/c)	:	11	orang
f.	Penata Muda Tk. I (III/b)	:	4	orang
g.	Penata Muda (III/a)	:	2	orang
h.	Pengatur Tk I (II/d)	:	2	orang
i.	Pengatur (II/c)	:	3	orang
j.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	:	0	orang
k.	Pengatur Muda (II/a)	:	0	orang
l.	PPPK	:	45	orang

2. Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut jabatan:

a.	Kepala Dinas Eselon II.a	:	1	orang
b.	Sekretaris Eselon III.a	:	1	orang

c.	Kabid Eselon III.b	:	4	orang
d.	Kasubag/Kasi /Ka. UPT eselon IV.a	:	14	orang
e.	Ka.Subag UPT Kec.Eselon IV.b	:	0	orang
f.	Staf	:	75	orang

3. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) menurut pendidikan :

a.	SD	:	1	orang
b.	SLTP	:	1	orang
c.	SLTA	:	11	orang
d.	Sarjana Muda / D.III	:	11	orang
e.	Sarjana Muda / D.IV	:	0	orang
f.	Sarjana / S-1	:	46	orang
g.	Pasca Sarjana / S-2	:	25	orang

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*13*
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan KTP Elektronik		84%	86%	88%	99,99%	99,44%	100,47	
		2. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga		84%	86%	90%	88,40%	90,68%	90,68%	
		3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun		95%	95%	98%	98,98%	102,62%	99,82%	
		4. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		35%	50%	34%	29,73%	39,48%	43,27%	

2.	Lama Pengurusan KTP	-		1 hari	1 hari	1 hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
3.	Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan	-		80%	85%	85%	83,77%	94,11%	94,16%	

2.3. ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Salah satu kebijakan untuk mempercepat pelayanan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan penerapan aksesibilitas jaringan teknologi informasi, oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Isu-isu penting yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk saat ini :

1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el).
2. Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA).
3. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan dan akta-akta capil masih rendah.
4. Kualitas SDM pengelola Administrasi kependudukan masih rendah.
5. Belum mengertinya petugas registrasi di tingkat Desa/Kelurahan tentang administrasi kependudukan.
6. Jarak tempuh masyarakat dalam mengurus Administrasi Kependudukan sangat jauh.

Ada Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat dalam pelaksanaan dari target Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

2.3.1 Faktor Internal

a. Faktor Kekuatan (Strengths)
   1. Adanya struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi (Kewenangan) yang jelas
   2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan

b. Faktor Kelemahan (Weaknees)
   1. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi Teknis SDM
   2. Budaya kerja yang masih lemah
   3. Belum Optimalnya Pengembangan Kinerja Organisasi

2.3.2 Faktor Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunities)
   1. Tersedianya UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
   2. Berlakunya Peraturan Mentri dalam negeri RI No. 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak
   3. Adanya perubahan Teknologi dan ilmu pengetahuan (IT)
   4. Tersedianya Anggaran APBD

5. Tersedianya Peraturam Bubati Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2012 Tentang pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Catatan Sipil gratis bagi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin

2.3.3 Faktor Ancaman / Tantangan (Threaths)

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Masih Kurangnya Akses Bilitas Terhadap Layanan Masyarakat Karena Jarak dari Pemukiman ketitik Layanan cukup jauh
3. Sering terjadi gangguan Aplikasi maupun Data Canter sehingga mengganggu Pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Alokasi Dana yang belum mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan
5. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan
6. Masih belum layaknya jaringan komunikasi dalam unsur layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7. Pengadaan Blanko KTP-E Yang terlambat dari Pusat
8. Kurangnya Koordinasi antara Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan OPD lain dan Perangkat Desa/Kelurahan
9. Belum adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Kecamatan yang Aksesnya susah ditempuh dan jauh dari Kabupaten.

Dari identifikasi faktor-faktor Internal dan Eksternal tersebut maka dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT, dapat dirumuskan Strategi / Kebijakan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dalam menghadapi tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yaitu dapat di lihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

FAKTOR INTERNAL / FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTHS :	WEAKNESSES :
	1. Adanya Struktur Organisasi dan Tupoksi yang jelas; 2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan;	1. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi teknis SDM; 2. Budaya kerja yang masih lemah; 3. Belum optimalnya kinerja organisasi
FAKTOR PELUANG (OPPORTUNITIES) : a. Tersedianya UU RI no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; c. Tersedianya Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik dari Pusat; d. Adanya perubahan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan (IT). e. Tersedianya anggaran APBD; f. Tersedianya Perbup Musi Banyuasin No. 06 tahun 2012 tentang Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Gratis bagi Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin.	STRATEGI : SO 1. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan secara aktif, memperbanyak koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Serta memanfaatkan per-kembangan tehnologi IT; 2. Memperbanyak kegiatan operasi penertiban terhadap pelanggar UU Kependudukan.	STRATEGI : WO 1. Meningkatkan kompetensi dan budaya kerja dengan pelatihan/pembinaan; 2. Mengoptimalkan kinerja organisasi dengan perkembangan tehnologi IT yang ada.
FAKTOR ANCAMAN /TANTANGAN (THREATHS) : a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan, b. Masih Kurangnya aksesibilitas terhadap masyarakat karena jarak dari pemukiman ke titik layanan cukup jauh c. Sering terjadi gangguan aplikasi maupun data center, sehingga mengganggu pelayanan Administrasi Kependudukan. d. Alokasi dana yang belum mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan, e. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan; f. Masih belum layaknya jaringan komunikasi dalam unsur layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. g. Pengadaan Blanko KTP-el yang terlambat dari pusat, h. Kurangnya koordinasi antara Dinas dengan OPD lain dan PerangkatDesa/Kelurahan;	STRATEGI : ST 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke tempat pelayanan; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan melalui Sosialisasi; 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD / instansi terkait dan perangkat Desa / Kelurahan.	STRATEGI : WT 1. Meningkatkan dan mengoptimal-kan SDM yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan dan instansi terkait dalam penyusunan data Kependudukan dan Validasi Data Penduduk.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang telah disusun telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. Di samping itu, Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang Program, Kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 belum terdapat usulan Program dan Kegiatan yang dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin guna mendukung kinerja dalam Pelayanan Masyarakat.

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (Rancangan Awal). Disamping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Berikut Pada tabel di bawah ini disajikan mengenai identifikasi Kebijakan Nasional maupun provinsi yang berpengaruh pada penyusunan kebijakan di kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Terhadap Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
I	Nasional		
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi memecahkan permasalahan dan menangani isu Strategis Daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian diatas maka dalam rangka mencapai Visi, Misi sebagaimana tersebut diatas, Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan beberapa tujuan untuk menangani isu – isu strategis yang terjadi antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil artinya berusaha seoptimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menitik beratkan pada Survey Kepuasan Masyarakat dengan memenuhi amanat Permen PAN dan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.

2. Meningkatkan efektifitas manajemen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin artinya berusaha seoptimal mungkin memberi Pelayanan dalam pembuatan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Meningkatkan Kinerja Aparatur, dengan indikator sasaran persentase Aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya dengan target 100 persen pada tahun 2025, hal ini disebabkan rasio antara anggaran yang tersedia untuk pendidikan dan pelatihan relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah Aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan perlu juga diperhatikan sejauh mana korelasi yang signifikan dari pengiriman Aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan peningkatan kinerja SDM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra OPD adalah :

“Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Akan Pembuatan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”

Alasan ditetapkan tujuan tersebut didasarkan pertimbangan masyarakat punya penilaian sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh OPD maupun perangkat kecamatan, desa atau kelurahan terhadap pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kependudukan, Akta Kelahiran dan lain-lain.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan OPD yang dilakukan melalui kuesioner kepada seluruh Kecamatan maupun OPD sehingga diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan oleh OPD.

Indikator lainnya untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat adalah mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kementerian Dalam Negeri. Dalam target Standar Pelayanan Minimal Kementerian Dalam Negeri ditetapkan jenis pelayanan dasar pelayanan dokumen kependudukan Indikatornya adalah cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan penerbitan Akta Kelahiran. Definisi operasional untuk masing-masing indikator adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan 1 hari harus selesai diterbitkan KTP.

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani, berdasarkan pengertian sasaran tersebut maka perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat dalam memenuhi unsur-unsur pelayanan yang tercantum dalam Standar Pelayanan.
2. Meningkatnya kualitas Loket Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dengan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja yang akan dicapai antara lain :
   - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan,
   - Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital,
   - Persentase Penerbitan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan,
   - Persentase Kartu Identitas Anak (KIA), yang diterbitkan,
   - Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan,
   - Persentase Akte Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan.
4. Terkelolanya Pengarsipan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai standar yang berlaku.

5. Meningkatnya Kinerja Aparatur.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025
1	Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan didukung database yang akurat dan terpercaya	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan,	95
		3. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Persentase Kepemilikan KTP Elektronik,	92
			- Lama pengurusan KTP,	1 hari
			- Persentaseanak usia 0-18 tahun Berakta Kelahiran,	99
			- PersentasePasangan Non Muslim yang Berakta Nikah,	100
			- Persentase Akurasi Data Kependudukan,	5
			- Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari,	36
			- Persentase penerbitan Akta Kematian,	100
			- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga,	92
			- Jumlah Kerja Sama antar Lembaga dalam Pemanfaatan Data	30

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin berusaha meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan melalui 5 Program, 16 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

Tabel 3.3

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MUSI BANYUASIN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						20.599.606.263,00							28.391.986.711,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.599.606.263,00							28.391.986.711,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						20.599.606.263,00							28.391.986.711,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.281.800.422,96						-	19.472.422.005,00	
		[Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil]	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 77.80	100 74.80	100 77.80	100 77.80	15.281.800.422,96	-	-	-	-	-	-	19.472.422.005,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	90.137.677,56			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai	-	155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	30.137.677,56	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	12.181.068.115,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai	-	13.121.781.405,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				116 Orang/bulan	12.181.068.115,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		13.121.781.405,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	205.326.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai	-	165.520.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				104 Paket	105.326.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		65.520.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.329.876.650,00			-	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	-	-	1.610.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	-		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	250.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	-		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	99.880.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	299.996.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	-		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	227.360.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai	-	1.720.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	177.360.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		1.220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	**15.281.800.422,56**	-	-	-	-	-	-	**19.472.422.005,00**	-
	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil]	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah** **Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel** **Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu** **Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran** **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik**	**100** **77.80**	**100** **74.80**	**100** **77.80**	**100** **77.80**	**15.281.800.422,56**	-	-	-	-	-	-	**19.472.422.005,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	867.869.980,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai	-	2.319.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	462.569.980,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	405.300.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		1.819.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	380.162.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai	-	380.420.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	190.610.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		190.490.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	99.930.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		99.930.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	**15.281.800.422,56**	-	-	-	-	-	-	**19.472.422.005,00**	-
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	89.621.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**1.226.361.750,00**						-	**1.533.668.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	**Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan** **Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)**	**100** **80**	**100** **60**	**100** **62**	**100** **64**	**1.226.361.750,00**	-	-	-	-	-	-	**1.533.668.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	-			100 % 12 bulan	653.761.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat	-	919.368.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1091 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				43000 Dokumen	417.008.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		601.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	**1.226.361.750,00**	-	-	-	-	-	-	**1.533.668.000,00**	-
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				300 Orang	59.363.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		99.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	**Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan** **Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)**	**100** **80**	**100** **60**	**100** **62**	**100** **64**	**1.226.361.750,00**	-	-	-	-	-	-	**1.533.668.000,00**	-
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				30000 Dokumen	77.390.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		88.768.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananiya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	-			100 %	572.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Masyarakat	-	614.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				6000 Dokumen	272.600.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Masyarakat		314.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	**1.226.361.750,00**	-	-	-	-	-	-	**1.533.668.000,00**	-
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				1 Laporan	300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**374.165.208,00**						-	**380.000.283,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	**Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan** **Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**100** **99**	**100** **99**	**100** **99**	**100** **99**	**374.165.208,00**	-	-	-	-	-	-	**380.000.283,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil yang Mudah, Cepat dan Akurat*	-			100 %	224.164.925,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Masyarakat	-	230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				17426 Dokumen	224.164.925,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Masyarakat		230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Terlaksana*	-			100 %	150.000.283,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Masyarakat	-	150.000.283,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	150.000.283,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Masyarakat		150.000.283,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**3.617.061.382,44**						-	**6.855.896.423,00**	
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**99.87**	**99**	**99.85**	**99.85**	**3.617.061.382,44**	-	-	-	-	-	-	**6.855.896.423,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang Terkumpul*	-			100 %	244.144.701,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat	-	285.000.620,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				54 Dokumen	84.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		85.000.620,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				30 Dokumen	160.144.701,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfataan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	-			12 bulan	1.889.242.364,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat	-	4.679.736.972,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				1 Dokumen	1.889.242.364,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		4.679.736.972,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	-			100 %	1.039.421.627,44			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat	-	1.388.465.831,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	566.998.631,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		669.998.631,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	**3.617.061.382,44**	-	-	-	-	-	-	**6.855.896.423,00**	-
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Dokumen	53.417.847,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**99.87**	**99**	**99.85**	**99.85**	**3.617.061.382,44**	-	-	-	-	-	-	**6.855.896.423,00**	-
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	154.315.995,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Laporan	149.692.466,44	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				15 Dokumen	114.996.688,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		118.467.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	-			100 %	444.252.690,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat	-	502.693.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	91.559.690,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	352.693.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		352.693.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**100.217.500,00**						-	**150.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**80**	**80**	**80**	**80**	**100.217.500,00**	-	-	-	-	-	-	**150.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan*	-			100 %	100.217.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat	-	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 dokumen Dokumen	100.217.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							**20.599.606.263,00**							**28.391.986.711,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) merupakan Acuan setiap perangkat Daerah dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan Rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi instrumen dan indikator dalam upaya mewujudkan pembangunan Daerah agar lebih terarah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan pembangunan nasional.

Dengan demikian Program dan Kegiatan Pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara Rinci dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Kependudukan Dan Pencataan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026.

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai mana tercantum dalam table 3.3

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rancangan Awal Rencana KerjaTahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin maka dengan ini untuk ketahui bersama bahwa merupakan dokumen yang sangat penting, untuk itu diharapkan program/kegiatan dan pagu anggaran yang diajukan dapat diterima dan direalisasikan.

Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan Alokasi Anggaran termasuk penghitungan DAU, Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum, dan Pencegahan Kriminal.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Sekayu, Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

AGUS KURNIAWAN SAPUTRA, S.IP., M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19880824 200701 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.IIIKel. KayuaraSekayu, Telp.(0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : Disdukcapil.muba@gmail.com
website : www.disdukcapil.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 050/ 2124/KEP/DISDUKCAPIL/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 31 tahun 2019 tentang penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor. 55), Undang-undang Darurat Nomor. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor.57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); RKPD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 BAB I PENDAHULUAN I-6

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); RKPD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021BAB I PENDAHULUAN I-7
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025; RKPD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 BAB I PENDAHULUAN I-8
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 67).

14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.
15. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-050/164/SETDA/2022 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengolahan data dan informasi
2. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
3. Menentukan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Mereview Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Kerja Provinsi
5. Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah yang berhubungan dengan keadaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6. Menganalisa Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis
7. Merumuskan isu – isu strategis
8. Merumuskan Visi dan Misi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Merumuskan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Organasisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Merumuskan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Mengikuti Seluruh Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan
12. Menetapkan Rencana Kerja Organsiasi Perangkat Daerah oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin

Ketiga : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Keputusan ini dibuat agar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sekayu, Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

AGUS KURNIAWAN SAPUTRA, S.IP., M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19880824 200701 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pahlawan No.05 RT.012/05 Lk.IIIKel. KayuaraSekayu, Telp.(0714) 321314, 321027
Fax. (0714) 321027, 321314 email : Disdukcapil.muba@gmail.com
website : www.disdukcapil.mubakab.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 050/ 2124 /KEP/Disdukcapil/2025
Tanggal : Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJATAHUN 2024 PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Agus Kurniawan Saputra, S.IP., M.Si	Plt.Kepala Perangkat Daerah	Ketua
1	Muhammad Salim, ST,.M.Si	Sekretaris	Wakil Ketua
2	Muhammad Adi Saparullah, S.P,.M.Si	Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Perencana	Sekretaris
3	Rudi, SE,.M.Si	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
4	Muhammad Soleh Iqbal, S.IP,.M.Si	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Zainal Abidin, S.IP,.M.Si	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
6	Marwan Sutami, ST,.MM	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
7	Sutriyosi, SE,.M.Si	Kassubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	M. Saleh, S.Sos,.M.Si	Kassubag Keuangan	Anggota
9	Elmis Suryani, SE,.M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Identias Penduduk	Anggota
10	Novrianty,ST,.M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Kelahiran	Anggota
11	Dwi Cahyani Wiwi, ST,.M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Komunikasi	Anggota
12	Jhon Hendra, S.Kom,.M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Kerjasama	Anggota
13	Bambang Asri Prayogi, SE,.M.Si	Analis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
14	Fathul anam, SH	Analis Pelaporan Akuntabilitas	Anggota
15	Nova Riana Kurniasari, S.ST., M.Kes	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
16	Triana Agus Setianto	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
17	Fadhony, SE	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
18	Desi Anggraini	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
19	Risky Andini	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

AGUS KURNIAWAN SAPUTRA, S.IP., M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19880824 200701 1 001